

## **Analisis Framing Pemberitaan Rancangan Undang–Undang Kesehatan Omnibus Law Pada Portal Berita Online**

### **Graha Wira Krida**

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina  
Email: [grahawirakrida@yahoo.co.id](mailto:grahawirakrida@yahoo.co.id)

### **Wahyu Widodo**

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina  
Email: [wahyu.wied16@gmail.com](mailto:wahyu.wied16@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui framing dari tvonenews.com dan liputan6.com dalam membingkai suatu berita tentang RUU kesehatan yang tengah menjadi kontroversi di masyarakat. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Undang–Undang (RUU) kesehatan *omnibus law* menyita perhatian dari tenaga kesehatan maupun masyarakat luas. Hal tersebut disebabkan pembahasan yang tidak dikomunikasikan secara masif kepada organisasi profesi kesehatan, dan masyarakat luas. Tidak adanya komunikasi yang memadai menjadi pokok penyebab kekisruhan dan gelombang protes dari kelompok masyarakat. Ketidaksetujuan masyarakat diarahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia dan DPR. Pemberitaan mengenai penolakan tenaga kesehatan dan pihak lain yang dirugikan dengan adanya RUU kesehatan *omnibus law* menjadi hal yang menarik untuk diulas lebih lanjut. Bagaimana tvonenews.com dan liputan6.com membingkai berita yang dikonsumsi masyarakat dari perspektif yang berbeda. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teori analisis framing model Entman dalam mengupas secara mendalam pemberitaan yang muncul. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tvonenews.com fokus pada penolakan tenaga kesehatan yang hak – hak yang terabaikan. Sedangkan liputan6.com menyampaikan ada masyarakat berpenghasilan rendah yang terancam dengan adanya RUU kesehatan omnibus law karena tidak adanya pembiayaan kesehatan bagi mereka.

**Kata Kunci:** Analisis Framing, Pemberitaan, Rancangan Undang – Undang Kesehatan Omnibus Law.

---

### **Abstract**

*This study aims to determine the framing of tvonenews.com and liputan6.com in framing news about the health bill, which is currently becoming a controversy in society. Discussion in the people's representative council regarding the draft health bill (RUU) attracted the attention of health workers and the wider community; this was due to the discussion not being communicated massively to health professional organizations and the wider community. The lack of adequate communication was the main cause of chaos and waves of protests from*

*community groups; public disapproval was directed to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the DPR. Reporting on the rejection of health workers and other parties who were harmed by the existence of the omnibus health bill is an interesting matter for further review. How tvonenews.com and liputan6.com frame the news consumed by the public from different perspectives This research method uses a descriptive qualitative approach with the theory of framing analysis of the Entman model to analyze the news that appears. The research findings show that tvonenews.com focuses on rejecting health workers whose rights are neglected, and liputan6.com conveys that there are low-income people who are threatened by the existence of the omnibus health bill because there is no health financing for them.*

**Keywords: Draft Health Omnibus Law, Framing Analysis, News.**

---

## **PENDAHULUAN**

Protes keras dari tenaga kesehatan maupun dari para pemerhati kebijakan yang berdampak luas kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang – Undang (RUU) Kesehatan yang terbaru dengan menggunakan metode omnibus law yaitu dengan menggabungkan beberapa undang – undang terkait dengan kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran secara umum menyangkut mengenai tidak adanya komunikasi yang intensif antar organisasi profesi di bidang kesehatan dengan kementerian kesehatan selaku pemangku kepentingan dan pihak yang menyusun RUU kesehatan tersebut.

Upaya unjuk rasa, demonstrasi maupun penyampaian pendapat yang dilakukan oleh organisasi profesi kesehatan dan seluruh massa yang ikut juga menyertainya merupakan sebuah bentuk dari wujud kehidupan demokrasi yang sehat dimana masyarakat memberikan responnya terhadap kebijakan yang menurut mereka tidak sesuai dengan aspirasi mereka, hal ini positif selama tidak ada kekebalan dari elit yang sedang di demo untuk tidak memperhatikan aspirasi masyarakatnya, komunikasi harus dengan seluruh pemangku (Ramadhoni Cahya Candra Wibawa, 2022).

Pemberitaan dari media sangat bervariasi mengenai isu penolakan dari organisasi, berbagai sudut pandang digunakan oleh media untuk mengupas mengenai isu RUU kesehatan yang sedang menjadi sorotan dan memancing perhatian yang tinggi dari organisasi profesi kesehatan yang bernaung dibawahnya sebagai ujung tombak pelaksana implementasi dari RUU kesehatan tersebut jika sudah ditetapkan dan disahkan di DPR.

Portal berita *online* membingkai isu penolakan organisasi profesi kesehatan dengan menggunakan pembahasan yang berbeda, hal ini cukup menarik karena media tentunya memiliki visi dan misi yang beranekaragam dalam menyampaikan informasi dan berharap informasi yang dikirimkan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Selain dari organisasi profesi kesehatan masih ada lagi pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan dengan hadirnya RUU kesehatan omnibus law tersebut. Namun pihak ini tidak sempat menyuarakan aspirasinya sehingga aspirasinya harus disampaikan melalui media supaya didengar dan diperhatikan oleh para pengambil kebijakan di pemerintah dan DPR

Media turut dalam kemeriahan pemberitaan mengenai RUU kesehatan *omnibus law* tersebut, hal ini menarik untuk diikuti apakah ada keberpihakan dari media atau media memberikan perspektif yang berbeda sehingga masyarakat juga memiliki perspektif yang tentunya tergantung dari informasi yang diterima, karena apa yang diterima itu merupakan sikap dari masyarakat secara umum terkait dengan isu yang tengah diangkat oleh media dan disajikan kepada masyarakat sebagai sebuah sumber informasi yang tengah hangat bergulir di tengah masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *framing* dari tvonenews.com dan liputan6.com tentang RUU kesehatan yang tengah dibahas di DPR untuk disahkan dan ditetapkan. Fokus perhatian dari penelitian ini yaitu bagaimana sudut pandang portal media *online* tvonenews.com dan liputan6.com membingkai isu pembahasan RUU Kesehatan *omnibus law* yang disajikan dan dipublikasikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan keberpihakan dari media tersebut terhadap isu ini?.

Peneliti menggunakan teori framing dalam melakukan riset mengenai pembingkaiian isu penolakan RUU kesehatan *omnibus law* oleh masyarakat yang dilakukan oleh media *online*. Teori ini secara umum menggunakan pendekatan realitas kondisi yang ada yang dibangun oleh media, proses membangun realitas inilah yang membuat khalayak menjadi

lebih mudah untuk mengingat faktor – faktor tertentu yang disajikan dengan sangat menonjol oleh media (Mutiara & Eriyanto, 2020).

Pendekatan dalam *framing* terdapat dua aspek yang sangat mengemuka dan dapat dilakukan pengamatan dengan seksama, pertama yaitu memilih apa yang ditampilkan dan apa yang tidak perlu ditampilkan sehingga sebuah kejadian hanya dilihat dari satu sisi saja, kedua dalam menuliskan berita dari sebuah kejadian menggunakan foto kata atau kalimat yang mencolok (Sulu et al., 2022)

Model *framing* yang digunakan untuk melakukan analisis framing yang dilakukan media menggunakan model Entman. *Framing* dalam model Entman pada dasarnya memiliki empat hal yang menjadi perhatian utama yaitu mengenai pemberian definisi, selanjutnya penjelasan, evaluasi dan rekomendasi terhadap sebuah topik yang tengah menjadi perhatian untuk memberikan penekanan apa yang penting menurut media tersebut untuk diangkat. (Reformansyah & Widiarti, 2020)

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan bagaimana bingkai pemberitaan menurut Entman. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengambil sampel pemberitaan dari portal media online yaitu dari portal media tvonenews.com dan liputan6.com tentang kasus pembahasan RUU Kesehatan omnibus law yang tengah dilakukan oleh DPR.

Media tersebut menjadi bahan penelitian karena memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi isu pembahasan RUU Kesehatan omnibus law yaitu dari sisi tenaga kesehatan yang menolak dan dari sisi kepentingan ekonomi yaitu kerugian masyarakat miskin dan kaum yang tidak berdaya yang lainnya yang tidak dapat bersuara lantang. Jadi tidak hanya tenaga kesehatan yang menolak adanya RUU kesehatan omnibus law tapi ada juga komunitas lain yang perlu diangkat isunya yaitu komunitas yang tidak dapat bersuara selama ini yaitu masyarakat miskin karena keterbatasan kemampuan, sumber daya, keilmuan dan lain sebagainya

Data yang diambil yaitu pemberitaan di tvonenews.com dengan judul “Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law, Ribuan Nakes Lakukan Aksi Di Gedung DPR” dan di portal liputan6.com dengan judul “Bila RUU Kesehatan disahkan, Koalisi Masyarakat Sipil : Kelompok Masyarakat ini Yang Paling Dirugikan”. Analisis data menggunakan model framing Entman.

## HASIL PENELITIAN

Berikut data pemberitaan online yang telah diambil oleh peneliti dari tvonenews.com dan liputan6.com yang kedepannya dianalisis seperti apakah framing yang dibentuk oleh media tersebut terhadap isu penolakan RUU kesehatan omnibus law.

**Gambar 1. Artikel tvonenews.com**



Sumber: <https://www.tvonenews.com/berita/127486-tolak-ruu-kesehatan-omnibus-law-ribuan-nakes-lakukan-aksi-di-gedung-dpr>

**Gambar 2. Artikel liputan6.com**



Sumber: <https://www.liputan6.com/health/read/5322955/bila-ruu-kesehatan-disahkan-koalisi-masyarakat-sipil-kelompok-masyarakat-ini-yang-paling-dirugikan>

*Framing* disini memberikan sebuah penekanan apa yang tidak perlu ditampilkan dalam sebuah teks berita sama pentingnya dengan apa yang harus ditampilkan ke permukaan untuk diperhatikan oleh masyarakat. Selanjutnya peneliti dalam melakukan riset ini, mengiris teks pemberitaan dengan pisau analisis model Entman yaitu *define of problem* (cara melihat

suatu kejadian, apakah dia bagian dari kejadian tersebut atau tidak), *diagnose cause* (siapa yang menjadi pencetus dari masalah), *moral judgement* (penilaian terhadap masalah yang muncul) dan *treatment recommendation* (saran penyelesaian terhadap penanganan masalah tersebut).

## PEMBAHASAN

Berikut pembahasan menggunakan model framing Entman dari pemberitaan liputan6.com dan tvonenews.com.

**Tabel 1. Analisis Framing Model Entman**

	Tvonenews.com	Liputan6.com
Analisis Framing	Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law, Ribuan Nakes Lakukan Aksi di Gedung DPR	Bila RUU Kesehatan Disahkan, Koalisi Masyarakat Sipil : Kelompok Masyarakat Ini yang Paling Dirugikan
<i>Define of problem</i>	Tenaga kesehatan merasa gelisah karena proses penyusunan rancangan yang tidak transparan, disertai juga isi RUU kesehatan <i>omnibus law</i> tidak memberi rasa aman dan nyaman bagi para tenaga medis dan kesehatan dalam bekerja.	Kelompok paling dirugikan adalah kelompok miskin, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat 3T (terluar, tertinggal, terdepan)
<i>Diagnose cause</i>	Organisasi profesi kesehatan tidak diajak berdiskusi terkait penyusunan RUU kesehatan <i>Omnibus Law</i>	Anggaran kesehatan sejumlah sepuluh persen dihapuskan dari RUU kesehatan <i>Omnibus law</i> yang sebelumnya ada anggaran kesehatan di UU kesehatan nomor 36 tahun 2009 yaitu 5% dari APBN dan 10% dari APBD
<i>Moral judgement</i>	Pada saat pandemi covid-19 yang berlangsung panjang, 3 tahun lamanya, tenaga medis dan kesehatan menjadi garda terdepan	Penghapusan standar minimal anggaran kesehatan, akan menimbulkan semakin minimnya dukungan terhadap pelayanan

	dalam penanganan pasien dan perlindungan masyarakat, namun saat menyusun RUU kesehatan, malah tidak dilibatkan oleh pemerintah, aspirasi mereka tidak didengarkan oleh pemerintah	kesehatan yang murah dan dapat dijangkau masyarakat luas, sehingga pelayanan kesehatan hanya berdasarkan belas kasihan semata.  Banyaknya belanja negara di bidang lain yang bersifat <i>mandatory</i> membuat kapasitas APBN dan APBD yang semakin menipis untuk pelayanan kesehatan
<i>Treatment Recommendation</i>	Pemerintah jangan sampai jatuh ke lubang yang sama atau ke kesalahan yang sama seperti UU cipta kerja <i>omnibus law</i> yang cacat hukum dan digugat oleh masyarakatnya, jadi ajak bicara organisasi profesi kesehatan yang terkena dampak langsung dari adanya RUU kesehatan omnibus law	Kesehatan merupakan bagian yang sungguh sangat penting dalam membangun kualitas manusia yang unggul.  Mendorong untuk memasukan anggaran minimal 10% kembali masuk dalam rancangan RUU kesehatan <i>Omnibus law</i>

Jika merujuk dalam table 1 diatas, mengenai analisis framing model Entman, pada pemberitaan online di tvonenews.com cukup terlihat jelas bahwa bingkai berita yang disampaikan ke khalayak luas adalah penyusunan rancangan RUU Kesehatan *Omnibus Law* yang tidak ada komunikasi antara pemerintah dan organisasi profesi kesehatan, sehingga organisasi profesi kesehatan menolak rancangan tersebut, karena isi di dalamnya membuat kenyamanan dan keamanan tenaga kesehatan dalam bekerja merasa terancam dengan kehadiran RUU Kesehatan *Omnibus law*.

Selanjutnya dari sudut pandang yang disampaikan Liputan6.com dengan adanya RUU Kesehatan ini membuat kalangan rakyat miskin menjadi terancam tidak dapat menikmati pelayanan kesehatan yang baik, karena ketiadaan biaya dari mereka, ketertinggalan mereka, di satu sisi kualitas manusia unggul harus tetap dijaga, sehingga diperlukan dukungan yang besar dari pemerintah untuk menetapkan standar minimal anggaran kesehatan dalam APBN

dan APBDnya untuk menopang kelompok rakyat miskin, masyarakat tertinggal, terdepan dan terluar, kaum disabilitas untuk tetap dapat menikmati pelayanan kesehatan yang baik karena dukungan dari pemerintah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Menurut hasil analisis framing model Entman di bab sebelumnya untuk membedah topik analisis framing pemberitaan rancangan undang undang kesehatan omnibus law dalam portal media online tvonenews.com dan liputan6.com sebagai berikut :

#### *1. Define of Problem*

Pada tvonenews.com permasalahan yang ditonjolkan adalah tenaga kesehatan merasa gelisah dan tidak aman, tidak nyaman bekerja dengan adanya RUU kesehatan tersebut, sedangkan pada liputan6.com menyatakan bahwa ada kelompok masyarakat yang dirugikan karena adanya RUU kesehatan omnibus law, yaitu kelompok masyarakat miskin, masyarakat terluar, terdepan, tertinggal, dan warga disabilitas.

#### *2. Diagnose Cause*

Pada tvonenews.com menyatakan sumber permasalahannya adalah ketiadaan organisasi profesi kesehatan untuk diajak berkomunikasi, berdiskusi dengan pemerintah dalam menyusun RUU Kesehatan omnibus law. Pada liputan6.com menuliskan dalam teks pemberitaannya mengenai sumber masalahnya adalah adanya penghapusan standar minimal anggaran kesehatan dalam APBN maupun APBD.

#### *3. Moral Judgement*

Tvonenews.com menyampaikan bahwa penilaian tenaga medis dan kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam penanganan pandemi covid-19 telah diabaikan oleh pemerintah dalam membuat rancangan undang – undang kesehatan *omnibus law* sehingga mereka melakukan perlawanan. Liputan6.com memuat mengenai belanja negara telah banyak porsinya diambil alih yang lebih *mandatory*, dan nantinya kesehatan hanya akan mendapatkan belas kasihan saja dari para pengambil kebijakan.

#### *4. Treatment Recommendation*



Tvonenews.com menuliskan bahwa langkah yang diambil pemerintah jangan sampai salah lagi seperti Undang – undang cipta kerja *omnibus law* yang digugat oleh konstituennya, dan perlu mengajak bicara organisasi profesi dalam menyusun RUU kesehatan tersebut. liputan6.com menuliskan bahwa kesehatan merupakan hal yang penting untuk membangun manusia Indonesia yang unggul sehingga harus didorong mengenai aturan minimal anggaran kesehatan sejumlah 10% dalam APBN dan APBD.

## Saran

Saran dari penulis, analisis framing untuk pemberitaan RUU Kesehatan Omnibus Law dapat ditindaklanjuti lebih jauh dengan menambahkan media pemberitaan online besar yang lain, hal ini supaya bisa dipelajari dan diketahui keberpihakan dari media itu bagaimana?, terkait pembahasan RUU kesehatan omnibus law. Suara masyarakat hendaknya dapat dikomunikasikan secara massif oleh media, supaya kepentingan masyarakat tetap mendapat perhatian dan difasilitasi oleh para pemangku kewenangan dan pengambil kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bila RUU Kesehatan Disahkan, Koalisi Masyarakat Sipil: Kelompok Masyarakat Ini yang Paling Dirugikan.* (2023, Juni). <https://www.liputan6.com/health/read/5322955/bila-ruu-kesehatan-disahkan-koalisi-masyarakat-sipil-kelompok-masyarakat-ini-yang-paling-dirugikan>
- Mutiara, D., & Eriyanto, E. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan pada Orientasi Pengenalan Kampus. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 115–140. <https://doi.org/10.24815/jkg.v9i1.16594>
- Ramadhoni Cahya Candra Wibawa, Y. C. (2022). PEMBINGKAIAN BERITA DEMONSTRASI UNDANG-UNDANG OMNIBUS. 9(1), 235–247.
- Reformansyah, M. A., & Widiarti, P. W. (2020). Analisis Framing Robert Entman Tentang Berita Kompas. Com Dan Detik. Com Tentang Kasus “Idi Kacung Who.” *Journal.Student.Uny.Ac.Id*, 306–314.
- Sulu, Y. Z., Londa, J. W., & ... (2022). Analisis Framing Pemberitaan Aksi Menolak Ruu Cipta Kerja Di Media Online Tirto Dan Cnn Indonesia. *Acta Diurna Komunikasi*, 1–9.
- Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law, Ribuan Nakes Lakukan Aksi di Gedung DPR. (2023, Juni). <https://www.tvonenews.com/berita/127486-tolak-ruu-kesehatan-omnibus-law-ribuan-nakes-lakukan-aksi-di-gedung-dpr>